

PERILAKU PEMILIH DALAM PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE TAHUN 2017 DI KECAMATAN MANGANITU

*Ade Lohoraung Putri Takasihaeng¹
Ventje Kasenda²
Alfon Kimbal³*

Abstrak

Sistem demokrasi memberikan kesempatan dan kepercayaan pada masyarakat untuk menentukan pilihannya pada orang yang mampu memimpin daerahnya. Pada tanggal 15 Februari 2017, Kabupaten Kepulauan Sangihe melaksanakan suatu praktek demokrasi dengan dilaksanakannya pemilihan kepala daerah. Salah satu kunci dalam pelaksanaan pemilihan umum adalah perilaku pemilih. Perilaku pemilih sebagai keikutsertaan masyarakat dalam sebuah pemilihan umum, mulai dari menentukan apakah akan ikut memilih atau tidak memilih sampai pada proses menentukan pilihan pada pemilihan kepala daerah tersebut. Berdasarkan tujuan penelitian tersebut maka metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara yang dilakukan di lokasi penelitian dan pengkajian dokumen pendukung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perilaku pemilih di Kabupaten Kepulauan Sangihe khususnya di Kecamatan Manganitu lebih dominion di pengaruhi oleh pendekatan Psikologis yaitu mempertimbangkan pilihan pada figur dari pasangan calon dan factor mengidenifikasi partai. Pemilih juga di pengaruhi oleh pendekatan Sosiologis yaitu mempertimbangkan pilihan pada faktor kekeluargaan dan adanya pendekatan Pilihan Rasional yaitu melihat visi dan misi serta kinerja dari pasangan calon yang membuat pemilih mempertimbangkan pilihannya dalam pemilihan kepala daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe tahun 2017 di Kecamatan Manganitu.

Kata Kunci: Perilaku Pemilih, Pemilihan Kepala Daerah, Demokrasi.

¹ Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP-Unsrat..

² Ketua Penguji/Dosen Pembimbing Skripsi

³ Sekretaris Penguji/Dosen Pembimbing Skripsi

Pendahuluan

Pemilihan kepala daerah (Pilkada) merupakan suatu proses demokrasi di Indonesia karena pemilihan kepala daerah juga merupakan salah satu praktik demokrasi dari pesta rakyat yang diadakan setiap lima tahun sekali memberikan kesempatan kepada rakyat untuk memilih pemimpinnya secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Pemilihan kepala daerah merupakan rekrutmen politik sehingga rakyat dapat melakukan penyeleksian terhadap tokoh-tokoh yang mencalonkan diri sebagai kepala daerah. Pemilihan kepala daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, Pasal 1 ayat (1) berbunyi : Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Yang Selanjutnya Disebut Pemilihan Adalah Pelaksanaan Kedaulatan Rakyat Di Wilayah Provinsi Dan Kabupaten/Kota Untuk Memilih Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis. Maka rakyat memiliki hak untuk menentukan pilihannya dalam pemilihan kepala daerah bupati dan calon bupati secara langsung dan demokratis.

Tanggal 15 Februari 2017, Kabupaten Kepulauan Sangihe melaksanakan suatu praktek demokrasi dengan mensukseskan pemilihan kepala daerah bersamaan dengan berbagai daerah yang di Indonesia. Dalam Pemilihan kepala daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun

2015, Pasal 1 ayat (4) disebutkan bahwa: "Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota." Pemilihan kepala daerah kabupaten kepulauan Sangihe ada dua (2) pasangan calon yang diusung oleh partai politik dan bertarung untuk menunjukkan kemampuan kandidat maupun partai dalam pemilihan kepala daerah di kabupaten kepulauan sangihe tahun 2017. Dua pasangan calon tersebut adalah : nomor urut 1 Drs. Hironimus Rompas Makagansa, M.Si dan dr. Fransiscus Silangen, Sp.B, KBD yang diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan pasangan calon nomor urut 2 Jabes Ezar Gaghana, SE, ME dan Helmud Hontong, SE yang diusung oleh partai Golongan Karya (Golkar) dan Hati Nurani Rakyat (Hanura).

Hasil Pemilihan Kepala Daerah kabupaten kepulauan Sangihe pada tahun 2017 adalah nomor urut 1 Drs. Hironimus Rompas Makagansa, M.Si dan dr. Fransiscus Silangen, Sp.B, KBD yang diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dengan perolehan suara sebanyak 37.737 (44,59%) dari 84.636 suara Sah, dan pasangan calon nomor urut 2 Jabes Ezar Gaghana, SE, ME dan Helmud Hontong, SE yang diusung oleh partai Golongan Karya (Golkar) dan Hati Nurani Rakyat (Hanura) dengan perolehan suara sebanyak 46.899 (55,41%) dari 84.636 Suara Sah. Dengan demikian, Pemilihan kepala daerah kabupaten kepulauan Sangihe pada tahun 2017 di menangkan oleh pasangan calon nomor urut 2 Jabes Ezar

Gaghana, SE, ME dan Helmud Hontong, SE yang diusung oleh partai Golongan Karya (Golkar) dan Hati Nurani Rakyat (Hanura). Selain itu di Kecamatan Manganiu, pemilihan Pemilihan kepala daerah kabupaten kepulauan Sangihe pada tahun 2017 di menangkan oleh pasangan calon nomor urut 2 Jabes Ezar Gaghana, SE, ME dan Helmud Hontong, SE yang diusung oleh partai Golongan Karya (Golkar) dan Hati Nurani Rakyat (Hanura) dengan perolehan suara sebanyak 5.839 dari 9.608 suara sah. Kunci dalam pelaksanaan pemilihan umum adalah pemilih. Perilaku pemilih dalam menentukan pilihannya dalam pemilihan kepala daerah sangat berdampak dan mempengaruhi hasil perhitungan suara pemilihan kepala daerah secara langsung terkait dengan peran masyarakatnya dalam memberikan dukungan suara kepada partai politik atau pasangan calon yang ada. Masyarakat yang berpartisipasi dalam proses politik atau pemilihan kepala daerah melalui pemberian suara atau kegiatan lain terdorong oleh keyakinannya bahwa melalui kegiatan bersama dapat mempengaruhi tindakan atau perilaku dari masyarakat dapat membuat keputusan dalam menentukan pilihan.

Kandidat menunjukkan kemampuan dalam pelaksanaan kampanye untuk memperkenalkan diri dari masing-masing kandidat partai politik serta memaparkan visi dan misi. Visi dan misi dari kedua pasangan calon yaitu visi dari pasangan calon dari urut 1 adalah Sangihe Kabupaten Bahari dengan salah satu misinya adalah mewujudkan sangihe sejahtera dan bermartabat dengan pengembangan sumber daya manusia berbasis perikanan serta, mewujudkan kehidupan masyarakat sejahtera rukun aman dan

damai serta bermartabat. Visi dari pasangan calon nomor urut 2 adalah kepulauan Sangihe, citra kedaulatan NKRI, Rakyat perbatasan yang sejahtera, berjatidiri dan Mandiri, dengan salah satu misinya yaitu menurunkan tingkat kemiskinan penduduk secara sistematis, terfokus, terpadu, menyeluruh dan konsisten serta mengelola sumber daya Alam dan Lingkungan Hidup berbasis Masyarakat. Maka dari itu, kedua pasangan calon mengangkat tentang mensejahteraan rakyat Kabupaten Kepulauan Sangihe dan mengembangkan sumber daya manusia serta pengembangan sumber daya alam yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe.

Pasangan calon dalam menarik dan mendapatkan dukungan dari pemilih, kandidat menunjukan hal-hal yang dapat memiliki identitas dari pasangan calon seperti penggunaan lagu-lagu kampanye serta istilah dari nama pasangan sehingga lebih menarik bagi pemilih untuk digunakan seperti nomor urut 1 "MASI HEBAT" yaitu Makagansa Silangen Hebat serta Pasangan Nomor 2 "MEGAHAGO" yaitu Memilih Gaghana Hontong (Memilih Gaghana Hontong). Ini yang merupakan salah satu cara dari pasangan calon untuk menarik pendukung dalam memberikan suaranya dalam pilkada. selain itu, adanya kontribusi dari masing-masing tim kemenangan dan tim sukses yang antusias dan aktif dalam memperkenalkan kandidat juga merupakan salah satu cara dalam upaya untuk menarik dukungan masyarakat serta dalam pemenangan pasangan calon. Perilaku dari masyarakat dalam pemilihan sangat menentukan hasil pemenangan dari kandidat karena jika hanya ada kandidat tanpa pemilih maka

tidak ada yang akan memilih pasangan calon dalam pemilihan kepala daerah.

Pemilihan kepala daerah kabupaten kepulauan Sangihe, hal menarik yang terjadi adalah bagaimana masyarakat menentukan pilihannya dalam melihat citra atau image (figur) dari kandidat serta menentukan pilihannya karena suatu partai politik, dan pasangan calon yang mencalonkan diri dalam pemilihan kepala daerah adalah dua petahana dalam partai yang berbeda. Pada periode 2011-2016 pemilihan kepala daerah dimenangkan oleh Drs. Hironimus Rompas Makagansa, M.Si (bupati kabupaten kepulauan Sangihe) dan Jabes Ezar Gaghana, SE, ME (wakil bupati kabupaten kepulauan Sangihe), dan sekarang pada pemilihan kepala daerah periode 2017-2022, Drs. Hironimus Rompas Makagansa, M.Si kembali mencalonkan diri sebagai bupati dan Jabes Ezar Gaghana, SE, ME mencalonkan diri sebagai bupati kabupaten kepulauan Sangihe. Perilaku pemilih dapat mengevaluasi apa yang dilakukan sebelumnya oleh para kandidat.

Fenomena yang terjadi dalam pemilihan kepala daerah di kabupaten kepulauan Sangihe tahun 2017 adalah dimenangkan oleh partai Golongan Karya (Golkar). Berbeda dari pemilihan-pemilihan sebelumnya yang dimenangkan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Ini dapat dilihat dari pemilihan kepala daerah kabupaten kepulauan Sangihe tahun 2011 yang dimenangkan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), pemilihan Legislatif Kabupaten kepulauan Sangihe pada tahun 2014 yang dimenangkan oleh partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dengan jumlah suara sah 8.713 dengan perolehan kursi sebanyak 6 kursi. selain itu, pemilihan Gubernur

provinsi Sulawesi Utara yang juga dimenangkan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dengan jumlah perolehan suara 29.103 dari 65.333 suara sah.

Pemilihan kepala daerah kabupaten kepulauan sangihe yang dilihat dari perilaku masyarakat dalam mengidentifikasi suatu partai sangat mempengaruhi pilihan dari pemilih, ini adalah suatu yang menarik untuk diteliti ketika pada pemilihan kepala daerah di tahun 2011 pemilihan kepala daerah dimenangkan oleh partai Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan sekarang pada pemilihan kepala daerah di kabupaten kepulauan sangihe khususnya di kecamatan Manganitu pada periode 2017-2022 dimenangkan oleh partai Golongan Karya (Golkar). Fenomena Ini pun terjadi di kecamatan Manganitu dimana pada pemilihan kepala daerah kabupaten kepulauan Sangihe pada Tahun 2011 dimenangkan oleh Drs. Hironimus Rompas Makagansa, M. dan Jabes Ezar Gaghana, SE, ME yang diusung dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), dan pada pilkada tahun 2017 di menangkan oleh Jabes Ezar Gaghana, SE, ME dan Helmud Hontong, SE yang diusung oleh partai Golongan Karya (Golkar) adanya perubahan yang terjadi dalam pemilihan kepala daerah.

Masyarakat pemilih melihat figur tokoh partai politik dalam menentukan pilihannya, sekaligus menjadi barometer mereka dalam menilai parpol yang bersangkutan. Apabila sang tokoh memiliki kualitas baik, berkemampuan dalam memaparkan visi-misi partai, aktif dalam kegiatan-kegiatan sosial rakyat, maka citra atau image partai dari tokoh tersebut pun akan dinilai baik. Maka dari itu, baik untuk diteliti adalah tentang fenomena yang terjadi yaitu

bagaimana masyarakat menentukan pilihannya dalam melihat figur dari kandidat. Dari segi figur masyarakat menentukan pilihan pada kandidat yang telah dikenal karena pernah memiliki kekuasaan dan pernah memimpin periode sebelumnya selain itu, partai politik juga dapat memiliki pengaruh karena partai pendukung pasangan calon adalah partai besar yang sama-sama pernah berkuasa di Kabupaten Kepulauan Sangihe.

Pasangan calon yang mencalonkan diri dalam pemilihan kepala daerah adalah dua petahana yang pernah berada di partai yang sama namun pada saat pilkada 2017 didukung oleh partai yang berbeda. Perilaku pemilih dapat berdampak pada pemilihan kepala daerah karena Masyarakat dalam memberikan dukungan dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor yang mungkin dapat menggoyahkan pilihan setiap individu, ini terlihat dengan fenomena yang terjadi perubahan kemenangan dan adanya kekalahan dari petahana dalam pemilihan kepala daerah tahun 2017 hal tersebut berkaitan erat dengan perilaku pemilih.

Banyak hal yang dapat mempengaruhi perilaku pemilih dalam pelaksanaan pesta demokrasi sehingga dalam memberikan dukungan hak suara dalam pemilihan kepala daerah berkaitan erat dengan kegiatan pengambilan keputusan untuk mendukung kandidat tertentu seperti karena pilihan keluarga atau faktor kekeluargaan, yang melihat latarbelakang kandidat, perilaku pemilih yang mengidentifikasi partai dalam menentukan pilihannya serta masyarakat melihat dari segi figur dari kandidat yang mencalonkan diri.

Tinjauan Pustaka

Perilaku dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yaitu tanggapan atau reaksi individu terhadap rangsangan atau lingkungan. Menurut Kurt Lewin dan Mar'at dalam Dr. Johny Lumolos, M.Si, (2013:121-122) menjelaskan perilaku sebagai fungsi karakteristik individu dengan lingkungan. Karakteristik individu meliputi motivasi, nilai sifat kepribadian, dan sikap yang saling berinteraksi satu sama lain dan kemudian berinteraksi pula dengan faktor-faktor lingkungan dalam menentukan perilaku. Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku menurut Ndraha dalam (Delly Mustafa, 2014:26), ada 2 faktor yaitu : pertama, kondisi yang datang dari luar dan (lingkungan) dan kedua, kepentingan disadari dari dalam oleh yang bersangkutan. Menurut Firmanzah dalam Efriza (2012:480), pemilih diartikan sebagai semua pihak yang menjadi tujuan utama para kontestan untuk mereka pengaruhi dan yakinkan agar mendukung dan kemudian memberikan suaranya kepada kontestan yang bersangkutan.

Menurut Ikhsan Darmawan (2015:156-157), Perilaku memilih (voting Behavior), menggunakan hak pilih atau biasa disingkat dengan memilih (voting) adalah salah satu bentuk partisipasi politik dalam sebuah pemilihan umum. Perilaku memilih (voting behavior) adalah kajian mengapa seorang individu lebih memilih salah satu calon atau partai politik lain. Pendapat lain dari Subakti dalam Efriza (2012:480), menjelaskan bahwa perilaku pemilih adalah aktivitas pemberian suara individu yang berkaitan erat dengan kegiatan pengambilan keputusan untuk memilih dan tidak memilih (to vote or not to

vote) di dalam suatu pemilu maka voters akan memilih atau mendukung kandidat tertentu.

Menurut Andrew Reynolds dalam (Rohaniah dan Efriza,2015:442) menyatakan bahwa pemilu adalah metode yang di dalamnya suara-suara yang diperoleh dalam pemilihan diterjemahkan menjadi kursi-kursi yang dimenangkan dalam parlemen oleh partai-partai dan para kandidat. Selain itu, Pemilu merupakan cara yang terkuat bagi rakyat untuk berpartisipasi di dalam sistem demokrasi modern. Pemilu merupakan instrument dalam mewujudkan kedaulatan rakyat, tentu saja dalam teknis pelaksanaannya membutuhkan aturan-aturan yang spesifik. (Rohaniah dan Efriza 2015:439). Menurut Haris (2007:10) Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan salah satu bentuk pendidikan politik bagi rakyat yang bersifat langsung,terbuka, masal yang diharapkan bisa mencerdaskan pemahaman politik dan meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai demokrasi. Menurut Gafar (2012:85) mengatakan bahwa melalui Pemilukada masyarakat dapat memutuskan apakah akan memperpanjang atau menghentikan mandat seorang kepala daerah, juga apakah organisasi politik penopang masih dapat dipercaya atau tidak. Oleh karena itu sebagai bagian dari pemilu, pilkada harus dilakukan secara demakrasi sehingga betul dapat memenuhi peran dan fungsi tersebut. Kemudian, menurut Samuel P. Huntington dalam Rizkyyansyah (2007:3) menyatakan bahwa sebuah negara bisa disebut demokratis jika didalamnya terdapat mekanisme pemilihan umum yang dilaksanakan secara berkala atau periodic untuk melakukan sikulasi elit.

Kemudian, menurut Paimin Napitupulu dalam Rohaniah, Efriza (2015:439-440), pemilu berarti rakyat melakukan kegiatan memilih orang atau sekelompok orang menjadi pemimpin rakyat, pemimpin negara atau pemimpin pemerintahan. Hal ini berarti pemerintahan itu harus dipilih oleh rakyat. Seluruh rakyat mempunyai hak melakukan pemilihan dan sebagian rakyat untuk menjadi pemimpin mereka, ini semua merupakan proses pemilu. Jadi, melalui pemilu, rakyat memunculkan calon pemimpin pemerintahan. Dengan demikian, pemilu adalah sebuah mekanisme politik untuk mengartikulasikan aspirasi dan kepentingan warga negara dalam proses memilih sebagian rakyat menjadi pemimpin pemerintahan.

Metode Penelitian

Jenis penelitian ini, berangkat dari rumusan masalah dan disesuaikan dengan tujuan yang ingin dicapai, maka jenis penelitian ini menggunakan jenis atau metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada. (Denzin dan Lincoln dalam Djam'an Satori 2014:23).

Fokus dalam penelitian ini adalah perilaku pemilih dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2017 di Kecamatan Manganitu. Fokus Penelitian yang digunakan adalah Teori yang di kemukakan oleh Anthonius Sitepu (2012:90), dengan melihat pendekatan psikologis (Identifikasi Partai), pendekatan sosiologis (kekeluargaan), dan Pendekatan pilihan rasional (visi dan misi serta program kerja).

Terkait dengan penelitian tentang perilaku pemilih dalam pelaksanaan kepala daerah kabupaten Kepulauan Sangihe tahun 2017 di kecamatan Manganitu, maka adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Panitia Pemilihan Kecamatan (2 orang)
2. Panitia Pemungutan Suara (1 orang)
3. Anggota Komisi Pemilihan Umum Sangihe (1 orang)
4. Tim Sukses Pasangan Calon (2 orang)
5. Pengurus Partai (2 orang)
6. Tokoh masyarakat (1 orang)
7. Masyarakat sebagai pemilih yang ada di kecamatan Manganitu (7 orang)

Hasil Penelitian

Perilaku pemilih melihat pada keikutsertaan masyarakat pemilih dalam mensukseskan pemilihan kepala daerah dengan menggunakan hak pilih dari menentukan pilihan sampai pada memilih pasangan calon. Dalam pemilihan kepala daerah kabupaten kepulauan sangihe tahun 2017 khususnya di kecamatan manganitu, perilaku pemilih dalam mempertimbangkan dan menentukan pilihannya didasarkan pada tiga pendekatan yaitu pendekatan psikologis dimana masyarakat memilih karena lebih tertarik pada partai politik atau mengidentifikasi partai politik dan melihat figur atau kandidat yaitu mempertimbangkan pilihannya karena tertarik dengan kepribadian dari pasangan calon. Selain itu, adanya pendekatan sosiologis dimana masyarakat pemilih memperimbangkan pilihan karena adanya faktor kekeluargaan dari pasangan calon kepala daerah. Adapun pendekatan lain adalah pendekatan

pilihan rasional, perilaku pemilih dalam menentukan pilihannya dipengaruhi oleh program kerja dan visi misi dari pasangan calon kepala daerah. Pemilihan Kepala daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe tahun 2017, berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dan hasil wawancara dengan informan di kecamatan Manganitu, ditemukan beberapa perilaku pemilih. Berikut ini peneliti akan menguraikan perilaku pemilih yang ditemui di Kecamatan manganitu sehubungan dengan pemilihan kepala daerah tahun 2017.

Pendekatan Psikologis

Secara psikologis orang lain mengidentifikasi dirinya dengan partai yang bersangkutan sama. Konsep psikologi sosial yang dipergunakan untuk menjelaskan perilaku untuk memilih pada pemilih umum berupa identifikasi partai. Partai politik merupakan sarana untuk memperkenalkan pasangan calon dalam pemilihan kepala daerah, di Kabupaten Kepulauan sangihe pasangan calon yang mencalonkan diri pada pemilihan kepala daerah tahun 2017 diusung oleh partai yang sudah dikenal oleh masyarakat dan pernah memimpin kabupaten kepulauan Sangihe pada periode sebelumnya. Perilaku pemilih dalam menentukan pilihan tidak lepas dari partai politik. Berikut ini peneliti paparkan aspek-aspek yang mempengaruhi pendekatan psikologis.

1. Identifikasi Partai

Dalam pemilihan kepala daerah kabupaten Sangihe tahun 2017, setiap pasangan calon yang mencalonkan diri dalam pemilihan tidak lepas dari partai pendukung yang mendukung pasangan calon tersebut. Pada pemilihan kepala daerah kabupaten kepulauan Sangihe tahun 2017 terdapat partai pendukung yang merupakan partai besar di

kabupaten kepulauan Sangihe yaitu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Partai Golongan Karya (Golkar) yang berkoalisi dengan partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) yang bersaing untuk memenangkan pemilihan kepala daerah Kabupaten Sangihe tahun 2017. Partai-partai tersebut yang pernah memimpin di kabupaten Sangihe dengan kinerja yang baik pada periode-periode sebelumnya ini yang merupakan daya tarik bagi pemilih yang melihat latar belakang dari partai pendukung yang dipakai oleh pasangan calon.

2. Figur atau Kandidat pasangan Calon

Dalam Pemilihan Kepala Daerah tahun 2017 yang menjadi pertimbangan dari pemilih dikecamatan Manganitu dalam menentukan pilihannya adalah paling dominan karena ketertarikan terhadap Figur dari kandidat pasangan calon yang mencalonkan diri dalam Pemilihan Kepala Daerah tahun 2017. Dalam pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Sangihe tahun 2017 terdapat dua petahana yang pernah memimpin Kabupaten Kepulauan sangihe pada periode sebelumnya. Pasangan calon tersebut adalah Drs. Hironimus Rompas Makagansa, M.Si Jabes Ezar Gaghana, SE, ME. Dan pada tahun 2017 kembali mencalonkan diri dalam pemilihan Kabupaten Kepulauan Sangihe. Persepsi dan penilaian pribadi terhadap kadidat atau tema-tema yang diangkat sangat berpengaruh terhadap pilihan pemilu yang di jatuhkan . Menurut pendekatan ini, salah satu kekuatan politik adalah produk dari sikap dan disposisi sseorang pemilih. Dalam pendekatan psikologis yang lebih melihat figur sebagai pertimbangan dalam menentukan pilihan dengan kajian perilaku pemilih memusatkan perhatiannya beberapa hal, salah

satunya adalah persepsi dan penilaian pribadi terhadap kandidat.

3. Pendekatan Sosiologis

Pengaruh sosiologis dengan perilaku memilih yakni identifikasi kelas sosial yakni kesamaan yang dalam pandangan pemilih, diantaranya keadaan sosial dirinya dari aspek agama, kelas sosial, etnisitas, gender dan juga aspek daerah tempat tinggal (kota dan desa). Preferensi politik seorang memilih dalam pemilihan umum dipengaruhi oleh latar belakang, demografis, sosial ekonomi, seperti jenis kelamin, tempat tinggal, jenis pekerjaan, pendidikan, kelas sosial, pendapatan dan agama dan sebagainya.

4. Faktor Kekeluargaan

Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2017 di Kecamatan Manganitu ikatan kekeluargaan masih melekat dengan kuat serta persaudaran yang erat menjadi daya tarik tersendiri dalam menarik dukungan dari masyarakat pemilih dalam mempertimbangkan dan menentukan pilihan kepada pasangan calon.

5. Pendekatan Pilihan Rasional

Pendekatan ini melihat bahwa kegiatan memilih sebagai produk kalkulasi untung dan rugi yang dijadikan sebagai pertimbangan adalah tidak hanya "ongkos" memilih akan tetapi kemungkinan suaranya itu dapat memberikan pengaruh terhadap hasil yang diharapkan dan juga sebagai alternatif berupa pilihan yang ada. Dalam pendekatan rasional yang menentukan dalam sebuah pemilihan umum bukanlah adanya ketergantungan terhadap ikatan social structural atau ikatan partai yang kuat, melainkan hasil penilaian rasional dari warga yang cakap. Para pemilih melakukan penilaian yang valid terhadap tawaran partai.

Kesimpulan

1. Masyarakat di Kecamatan manganitu sangat antusias dalam melaksanakan pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2017, Partisipasi politik di kecamatan manganitu tinggi, yakni 81,04%.
2. Pendekatan psikologis yang melihat figure dari pasangan calon menjadi dasar pertimbangan bagi pemilih dalam menentukan pilihannya di pemilihan kepala daerah kabupaten kepulauan Sangihe tahun 2017.
3. Pendekatan sosiologis dan Pilihan Rasional juga menjadi salah satu pertimbangan dari pemilih untuk menentukan pilihannya dalam pemilihan kepala daerah tahun 2017, dengan melihat faktor kekeluargaan dengan pasangan calon dan melihat dari visi, misi dan program kerja yang ditawarkan pasangan calon namun faktor pendekatan ini tidak terlalu Nampak sebagai hal yang dapat mempengaruhi perilaku pemilih di pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2017.
4. Pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan kepala daerah kabupaten kepulauan sangihe tahun 2017, disebabkan oleh faktor keadaan yang mengharuskan pemilih untuk menetap di luar daerah karena pekerjaan dan pendidikan sehingga tidak dapat kembali ke daerah khususnya di kecamatan Manganitu pada saat pelaksanaan pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2017.

Saran

1. Pihak penyelenggara pemilihan kepala daerah baik di tingkat daerah maupun kecamatan harus lebih meningkatkan proses sosialisasi kepada masyarakat sebagai pemilih tentang pengetahuan mengenai

pemilihan umum, Sehingga masyarakat semakin sadar tentang pentingnya keikutsertaan pemilih dalam pemilihan umum kepala daerah.

2. Pemilihan Kepala daerah harus menjadi perhatian khusus oleh masyarakat sebagai pemilih karena dengan menggunakan hak pilih maka proses demokrasi sebagai wadah masyarakat untuk menentukan pilihan pada pemilihan umum dapat terlaksana dengan baik.
3. Masyarakat sebagai pemilih harus lebih aktif dalam ikut berpartisipasi dalam mensukseskan pemilihan umum dimasa yang akan datang, bukan saja pada saat pelaksanaan penggunaan hak pilih tapi juga pada proses pelaksanaan pilkada.
4. Partisipasi politik masyarakat sebagai pemilih harus ditingkatkan, lebih berpartisipasi langsung dalam proses penyelenggaraan pemilihan kepala daerah sehingga angka golput dari waktu ke waktu untuk ke depannya dapat berkurang.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, A. 2015. Perspektif Ilmu Politik. Jakarta: RajaGrafindo Persada
- Arifin, W. 2016. Perilaku Memilih dalam Pemil. Yogyakarta: Orbit
- Budiardjo, M. 2008. Dasar-dasar Ilmu Politik. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Darmawan, I. 2015. Mengenal Ilmu Politik. Jakarta: Kompas Media Nusantara.
- Efriza. 2012. Political Explore. Bandung: ALFABETA.
- Gaffar, J.M. 2012. Politik Hukum Pemilu. Jakarta: Konstitusi Press.
- Hafied, C. 2016. Komunikasi Politik : Konsep, Teori dan Strategi. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

- Kantor Kecamatan Manganitu
Kabupaten Kepulauan Sangihe
KPU Kabupaten Kepulauan Sangihe,
2017. Laporan Tahapan Pemilihan
Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan
Sangihe Tahun 2017. Tahun: KPU
Kab.Sangihe
- Kaelan, H. dan Zubaidi. 2010.
Pendidikan Kewarganegaraan.
Yogyakarta: PARADIGMA
- Kimbal, A, dan Frets. A. Goraph. 2017.
Marketing Politik Lokal.
Yogyakarta: Alinea Baru.
- Labolo, M. 2014. Memahami Ilmu
Pemerintahan. Jakarta: RajaGrafindo
Persada
- Lumolos, J. 2013. Penguatan Kapasitas
DPRD di Era Demokrasi, Bandung:
LEPSinDO
- Mustafa, D. 2014. Birokrasi
Pemerintahan, Bandung:
ALFABETA
- Noor, A. M. dan Tim Pengkajian. 2011,
Pemilihan Kepala Daerah:
Pengkajian Hukum Tentang
Pemilihan Kepala Daerah. Jakarta
Timur: BPHN Kementrian
Hukum dan Hak Asasi Manusia RI
- Pahlevi I, 2011, Politik Pemilukada.
Jakarta Pusat: P3DI Sekjen DPR
Republik Indonesia
- Rizkiyansyah, F. K. 2007. Mengawali
Pemilu Menatap Demokrasi.
Bandung: IDEA Publishing
- Rohaniah, Y. dan Efriza. 2015.
Pengantar Ilmu Politik. Malang:
Intrans Publishing.
- Rudianto, D. dan HS Kirbiantoro. 2008.
Acuan Kampanye Manajemen
pemasaran Partai Politik Strategi
Pemenangan Pemilu 2009. Jakarta.
- Satori, D dan Aan Komariah. 2014.
Metodologi Penelitian Kualitatif.
Bandung: ALFABETA
- Sitepu, P. A. 2012. Teori-Teori Politik.
Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sugiyono. 2016. Metode Penelitian
Kuantitatif, Kualitatif dan R&D.
Bandung: ALFABETA.
- Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 10 Tahun 2016 Tentang
Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2015 Tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2014 Tentang
Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan
Walikota Menjadi Undang-Undang.